

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah pada era baru memberikan banyak perubahan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Kebijakan ini merupakan harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri.

Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan tolak ukur kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah. Namun, fenomena yang muncul seiring dengan diterapkannya otonomi daerah adalah ketidaksiapan pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Untuk menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah sebaiknya dapat berupaya untuk terus menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah dalam APBD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing daerah sangatlah beragam, dikarenakan adanya perbedaan dalam jumlah penduduk, keadaan geografis, serta kemampuan sosial ekonomi masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini mengakibatkan biaya penyedia pelayanan kepada masyarakat yang berbeda disetiap daerahnya. Sejumlah sektor yang menjadi andalan Kabupaten Bandung Barat untuk meraup pendapatan asli daerah, diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), dan pajak retribusi (Yolanda, 2016).

Menurut data yang didapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 terhadap total pendapatan daerah tergolong masih rendah yaitu 16,77% dari jumlah penerimaan daerah. Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Berikut gambaran tentang realisasi pendapatan asli daerah dan target capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016

TA	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi PAD (%)	
			Dari seluruh total realisasi anggaran	Dari seluruh total pendapatan daerah
2012	113.213.153.861,00	136.241.257.300,00	120,34	9,57
2013	176.874.685.841,00	187.170.467.143,05	105,82	11,20
2014	254.795.835.592,00	248.697.185.722,70	101,18	13,01
2015	284.203.549.565,00	314.621.268.982,71	110,70	14,60
2016	342.227.266.893,00	276.220.675.006,00	109,93	16,77
			$\bar{X} = 109,594$	$\bar{X} = 13,03$

Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah kembali)

Tabel tersebut menggambarkan bahwa rata-rata realisasi pendapatan asli daerah dari seluruh total belanja daerah tahun anggaran 2012-2016 sebesar 13,03%, angka tersebut memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah tergolong masih rendah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditantang untuk berkemampuan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah secara maksimal, diantaranya melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang hingga saat ini menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketersediaan anggaran APBD lebih memadai.

Pendapatan asli daerah selain guna menunjang ketersediaan pengalokasian dana untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerahnya sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat ditempuh dengan cara meningkatkan belanja modal pemerintah daerah secara terarah dan terencana sesuai dengan kebijakan anggaran

Peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerahnya akan memberikan efek positif terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan anggaran belanja modal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan diharapkan dapat lebih mensejahterakan masyarakat.

Peranan pendapatan asli daerah adalah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah salah satunya adalah belanja modal. Pengalokasian belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan dan mesin, tanah, gedung dan bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi modal yang dikeluarkan ini akan menjadi sumber anggaran belanja modal pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya secara umum realisasi anggaran belanja modal jumlahnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasi yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh publik.

Kondisi tersebut terjadi pula pada Kabupaten Bandung Barat khususnya pada tahun 2012. Sebagaimana tampak pada tabel 1.1 yang memperlihatkan, bahwa realisasi belanja modalnya menjadi kelompok kabupaten dengan belanja modal terendah diantara 10 kabupaten di Pulau Jawa yakni 23%.

Tabel 1.2
Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah pada 10 Kabupaten di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2012

No.	Kab/Kota	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)
1	Kab. Bekasi	37%
2	Kab. Banjar	29%
3	Kab. Bogor	29%
4	Kab. Demak	28%
5	Kab. Karawang	27%
6	Kab. Jepara	24%
7	Kab. Bandung Barat	23%
8	Kab. Bandung	23%
9	Kab. Majalengka	23%
10	Kab. Sampang	23%

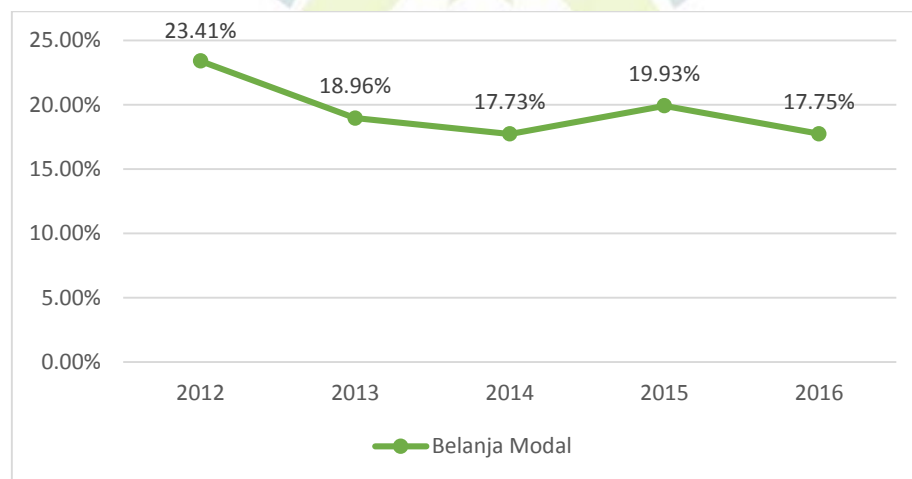
Sumber: DJPK RI, 2017 (diolah kembali)

Tabel diatas memperlihatkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah pada 10 kabupaten di Pulau Jawa tahun 2012. Dari 10 Kabupaten tersebut, hanya ada satu daerah yang dapat mencapai target lebih dari 30% porsi belanja modal yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Kabupaten Bekasi, sedangkan Kabupaten

Bandung Barat berada pada kelompok paling rendah bersama dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sampang yaitu masing-masing hanya mencapai 23%.

Trend realisasi belanja modal dari nilai total belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun Anggaran 2012-2016 dapat terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.1
Trend Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016



Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah kembali)

Dari data tersebut pertumbuhan nilai belanja modal dari nilai total belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016 terlihat fluktuatif bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2012 sampai 2013 yaitu sebesar 4,45%, lalu terjadi penurunan kembali pada tahun 2014 sebesar 1,23%. Dari grafik tersebut, terlihat pada belanja modal Pemerintah Kabupaten

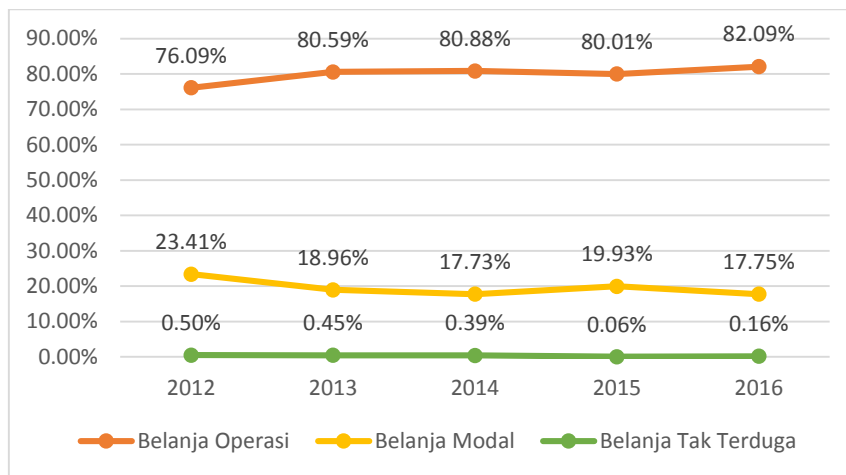
Bandung Barat selama 1 tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 2,2%, namun terjadi lagi penurunan sebesar 17,75% pada tahun 2016. Rata-rata realisasi belanja modal dari seluruh total belanja daerah sebesar 19,56%.

Menurut Kemendagri persentase belanja modal harus mencapai 30%, menurutnya masih banyak pemerintah daerah yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut (Admin, 2013).

Pada sisi lain realisasi anggaran belanja modal pun ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja operasi, padahal belanja tersebut manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh publik, semisal pengeluaran untuk pemberian gaji dan tunjangan pegawai. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Suharman Hidayat dalam Yuniar (2013: 4) bahwa “belanja operasi/rutin khususnya belanja pegawai yang menempati prioritas utama belanja pemerintah pusat, tidak boleh melebihi 60%”. Pada kenyataannya, realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam lima tahun terakhir melebihi angka 60% setiap tahunnya. Berikut perbandingan realisasi anggaran belanja operasi, belanja modal, serta belanja tak terduga Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016.

Perbandingan persentase belanja daerah Kabupaten Bandung Barat tahun Anggaran 2012-2016 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1.2
Perbandingan Belanja Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016



Sumber: LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016 (diolah kembali)

Dari perbandingan persentase realisasi belanja modal dari total nilai belanja daerah tahun 2012-2016 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan, berbeda halnya dengan realisasi belanja operasi yang terus mengalami peningkatan hanya sekali saja mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 1,87% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 belanja modal hanya mencapai angka 17,75% dari total nilai belanja daerah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,25% adalah belanja diluar belanja modal. Hal ini menunjukkan pengeluaran untuk belanja modal masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan pengeluaran belanja lain selain belanja modal, seperti belanja operasi sebesar 82,09% dari total belanja daerah nilai tersebut merupakan nilai terbesar dari lima tahun terakhir, lalu sisanya belanja tak terdunya sebesar 0,16%.

Data tersebut memperlihatkan, bahwa perbandingan realisasi belanja operasi dengan total nilai belanja daerah tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Surahman Hidayat yang tidak boleh melebihi 60%. Fakta yang terjadi bahwa sepanjang lima tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat lebih banyak mengalokasikan anggaran belanjanya untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal yang sebenarnya lebih menyentuh kepentingan pelayanan publik. Hal ini tampak dari rata-rata belanja modal yang terealisasi hanya sebesar 19,56% pertahun.

Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerahnya tersebut, guna mendanai belanja modal secara lebih memadai hingga masyarakat tidak terkendala oleh keterbatasan fasilitas umum atau infrastruktur guna menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari sesuai kebutuhannya.

Implikasi dari kebijakan tersebut, tampak dari hasil pembangunan fisik terutama pembangunan dan kondisi infrastruktur pada beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat yang masih jauh dari memadai. Salah satu contohnya adalah jembatan yang berlokasi di Kampung Pabuaran dan Bonceret di Desa Rancapanggung yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari warga dan aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut terganggu.

Menurut warga sekitar, Deden (35) dalam Pikiranrakyat.com bahwa, kondisi jembatan saat ini semakin parah dan sulit dilalui oleh warga. Tak heran, bila aktivitas

sehari-hari warga terganggu akibat rusaknya jembatan tersebut. Menurut dia, lambatnya perbaikan juga mengganggu aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Ridwan dalam PikiranRakyat.com pernah mengungkapkan, perbaikan jembatan itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 1 miliar (Sari, 2017).

Selain hal itu, persoalan pelik lainnya yang mengganjal menyangkut infrastruktur pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang masih kurang memadai. Menurut Anggota DPR RI Daerah Pemilihan II Jawa Barat, Dadang Rusdiana dalam POJOKJABAR.com bahwa, kondisi infrastruktur dan sarana pendukung objek wisata alam Stone Garden di Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung masih memprihatinkan. Dibutuhkan perbaikan agar akses menuju wisata alam ini jauh lebih nyaman saat pengunjung datang. Secara nasional menurut Dadang, Kementerian Pariwisata mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk promosi pariwisata. Dengan dana itu, ditargetkan 20 juta wisatawan tahun ini datang ke Indonesia (Oche, 2017).

Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan nilai belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah ditantang untuk berkemampuan memaksimalkan pendapatannya, baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun bantuan dari pusat.

Penelitian ini merupakan perbandingan dari penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Arny Yuniar (2013) dalam penelitiannya memaparkan bahwa terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Lalu dalam penelitian Agus Budi Santosa dan Muhammad Ainur Rofiq menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk membiayai belanja modal lebih banyak bersumber dari PAD. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nina Hartiningsih dan Edynus Herman Halim (2015) memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pendapatan pemerintah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah (2016) menyatakan, bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum memiliki peran penting dalam alokasi belanja modal daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Erdi Adyatma dan Rachamawati Meita Oktaviani menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel *independen* dan *dependen* yaitu PAD dan Belanja Modal, objek yang diteliti adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan

periode lima tahun, serta lokus yang diteliti yaitu di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2012-2016”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Pemerintah Pusat yang masih cukup besar.
2. Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan nilai total pendapatan daerah.
3. Realisasi belanja modal dari nilai total belanja daerah Kabupaten Bandung Barat tergolong paling rendah yaitu sebesar 23% diantara 10 Kabupaten/Kota di pulau Jawa.
4. Terjadinya penurunan realisasi anggaran belanja modal Kabupaten Bandung Barat dari tahun anggaran 2012-2016.
5. Realisasi belanja modal belum mencapai target sebesar 30%.

6. Realisasi belanja modal yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja operasi karena manfaat belanja modal akan dirasakan langsung oleh publik, dan dapat mengoptimalkan pelayanan publik.
7. Belum memadainya infrastruktur ekonomi, sehingga mengganggu aktivitas warga sehari-hari serta perekonomian masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan total pendapatan daerah.
2. Realisasi belanja modal belum mencapai target sebesar 30%.
3. Persentase realisasi belanja modal terhadap belanja daerah Kabupaten Bandung Barat tergolong yang terendah yaitu sebesar 23% diantara 10 Kabupaten/Kota di pulau Jawa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh dimensi pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja modal sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2016?

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sepanjang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja modal sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2016?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sepanjang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016?

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya, terutama untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, khususnya mengenai permasalahan yang diambil, yakni teori dan pengaruh sumber pendapatan asli daerah dalam kaitannya dengan belanja modal suatu pemerintahan daerah. Memperkaya khasanah pengetahuan tentang administrasi publik, khususnya terkait dengan administrasi keuangan dan manajemen publik.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan anggaran pemerintah khususnya pendapatan asli daerah dan belanja modal. Juga kepada pihak-pihak lainnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding di kalangan akademis dalam penelitian selanjutnya.

1.7 Kerangka Penelitian

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 2011).

Di setiap daerah tentunya memiliki kebutuhan tersendiri dalam mengurus pemerintahannya. Untuk dapat menjalankan pembangunan di daerahnya sesuai kebutuhan, maka pemerintah daerah harus memiliki anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut. Ketersediaan anggaran ini terkait dengan sumber penerimaan daerah, penerimaan daerah ini pun tentunya berbeda pada setiap daerah.

Penerimaan daerah diharapkan mampu untuk memajukan daerahnya sendiri dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang dapat bermanfaat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menentukan belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan daerahnya dengan tujuan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah maka diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, maka terdapat berbagai sumber penerimaan daerah, salah satunya yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah memiliki peran tersendiri dalam upaya membiayai pelaksanaan otonomi daerah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah, yang realisasinya dapat diterapkan pada pengalokasian belanja modal guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Abdul Halim PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004 hal. 94). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan kekayaan daerahnya sendiri, maka semakin besar pula hasil kekayaan yang diperoleh. Dengan demikian akan semakin besar kontribusi daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Sehingga akan semakin kecil ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pengertian pendapatan asli daerah yang diungkapkan oleh Abdul Halim (2004: 94) dalam bukunya, ia mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama karena lebih disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di daerahnya tersebut. Kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut kemudian dituangkan kedalam anggaran pengeluaran/anggaran daerah. Salah satu anggaran penting dalam pengeluaran daerah merupakan belanja modal, karena belanja modal sendiri realisasinya akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat karena merupakan suatu bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Belanja modal menurut Abdul Halim dan Kusufi merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:

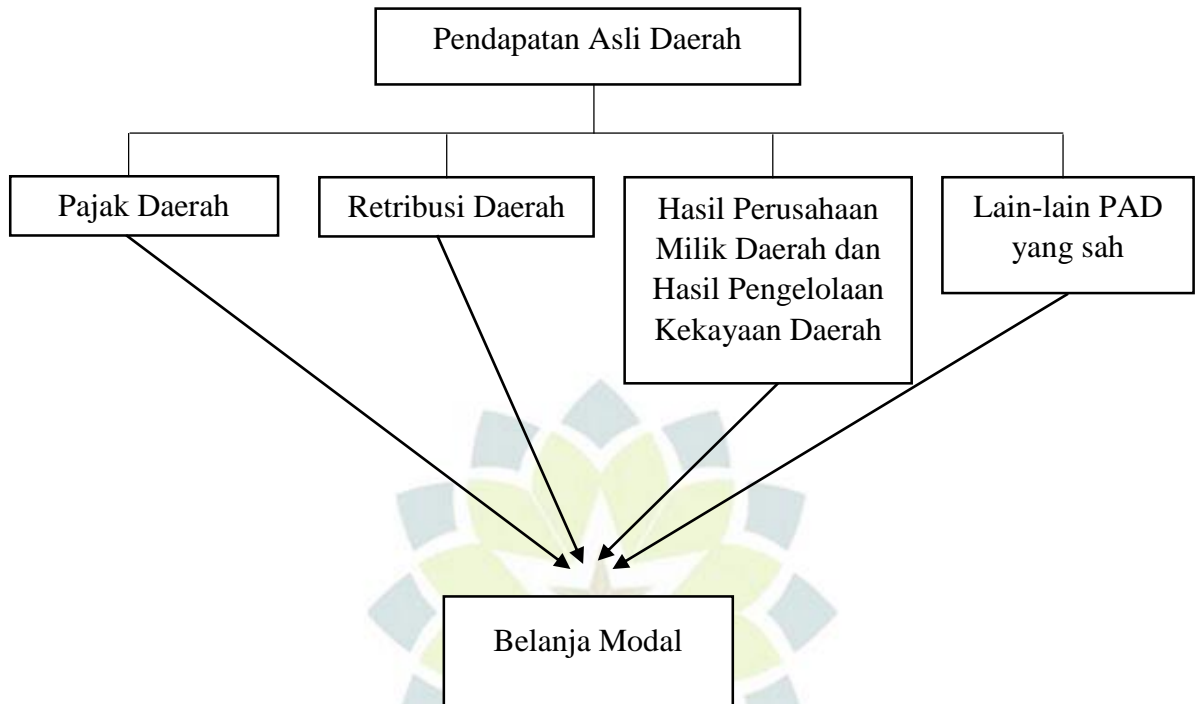
1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja modal gedung dan bangunan;

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya (Halim, et al., 2012 hal. 107).

Belanja modal dimaksudkan untuk memperoleh aset tetap pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, peralatan, pemenuhan fasilitas umum, serta aset tetap lainnya. Pengalokasian belanja modal sebaiknya diselaraskan dengan kebutuhan sarana dan prasarana guna mencapai kelancaran tugas pemerintah serta untuk pengadaan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat akan menjadi lebih produktif.

Pemerintah daerah sendiri haruslah dapat memperhitungkan bagaimana kemampuan daerah dalam membiayai segala kegiatan pemerintah serta menentukan alokasi belanja sehingga anggaran dapat digunakan seefisien mungkin dalam setiap penyusunan anggaran. Sehingga semakin tinggi pendapatan daerah yang didapat maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan pendapatan asli daerah tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menggunakan pendapatan sebaik mungkin guna mewujudkan pembaharuan pelayanan semaksimal mungkin sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat pengaruh positif secara parsial antara dimensi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
- H2 : Terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.